

Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Rifki Khoirudin

rifki.khoirudin@ep.uad.ac.id
Universitas Ahmad Dahlan

Jannatul Liutammima Musta'in

Jannatul.mustain@ep.uad.ac.id
Universitas Ahmad Dahlan

ABSTRACT

Economic growth is one indicator of the success of development in each region. High economic growth has an impact on income inequality. Inequality of income has become an important issue for the development of individual countries. The main problem in income distribution is the occurrence of differences in income distribution. Inequality of income is a measure of the distribution of people's income in an area or region within a certain period. Higher income inequality means that income distribution in the community is more equitable. This study aims to determine the effect of economic growth, unemployment rates, fiscal decentralization, and minimum wages to the level of income distribution inequality in DIY in 2012 - 2018. The analytical method that will be used to analyze this research is to use a panel data regression model using secondary data . The results of this study indicate the level of open unemployment and district/city minimum wages have a positive and significant effect on the level of income distribution inequality, while economic growth and fiscal decentralization do not affect the level of income distribution inequality.

*Keywords: **Economic Growth; Inequality income; panel regression,***

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu dari indikator keberhasilan pembangunan di setiap wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan (*income inequality*) menjadi isu penting bagi pembangunan setiap negara. Masalah utama dalam distribusi pendapatan adalah terjadinya perbedaan di dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan tolok ukur dari distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah pada periode tertentu. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, disentralisasi fiskal, dan upah minimum terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di DIY tahun 2012 – 2018. Metode analisis yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi data panel menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, sementara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Keywords: pertumbuhan ekonomi; ketimpangan pendapatan; regresi panel,

PENDAHULUAN

Dalam suatu perekonomian pertumbuhan ekonomi adalah salah satu dari indikator keberhasilan suatu pembangunan di setiap wilayah. Usaha dari suatu pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dari masyarakatnya tercermin dalam tingkat pertumbuhan ekonominya. Semakin tinggi suatu tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin baik tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Terjadinya peningkatan dari pertumbuhan ekonomi di suatu tahun tertentu dapat diartikan adanya peningkatan dari nilai barang dan jasa yang diproduksi pada periode tahun tersebut. Untuk itu, seluruh kegiatan dari pembangunan harus difokuskan untuk upaya peningkatan dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah dengan arah yang negatif. Artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kapasitas produksi sehingga output juga meningkat. Bertambahnya output akan menambah pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan perkapita dan selanjutnya ketimpangan pendapatan antar wilayah akan semakin mengecil. Hal ini juga dapat dijelaskan melalui mekanisme pusat pertumbuhan di mana pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat membawa pengaruh bagi daerah lain baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Jika pertumbuhan di suatu daerah menyebabkan perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (positif) karena terjadi proses penetesan ke bawah (*trickling down effect*), sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi imbas yang kurang baik (negatif) karena terjadi proses pengkutuban (*polarization effect*) (Kurniasih, 2013).

Selain pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan (*income inequality*) juga menjadi isu penting bagi pembangunan setiap negara. Secara teoritis dan didukung oleh banyak penelitian empiris terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan berkaitan dengan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata. Kondisi ini pada akhirnya akan memperbesar kesenjangan (*gap*) antara masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif baik (kelompok kaya) dengan mereka yang berpendapatan rendah (kelompok miskin) (Amri, 2017).

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kenaikan pendapatan per kapita suatu masyarakat. Namun dalam suatu pembangunan ekonomi hal tersebut belum tentu menjadikan apa yang dicapai dalam pendapatan per kapita sebagai indikator tunggal dan memusatkan fokus pada kualitas dari proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi adalah merupakan gambaran yang riil dari dampak suatu kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan tersebut dapat diraih dan terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, yang mana laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari perubahan dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun.

Menurut Sjafrizal (2009) ketimpangan pembangunan antar wilayah dipicu oleh beberapa hal antara lain: perbedaan potensi daerah yang sangat besar, perbedaan kondisi demografis dan ketenagakerjaan, dan perbedaan kondisi sosial budaya antar wilayah. Di samping itu kurang lancarnya mobilitas barang barang dan orang antar daerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan regional. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Masalah yang utama dalam distribusi pendapatan adalah terjadinya perbedaan di dalam distribusi pendapatan. Hal ini bisa terjadi sebagai akibat dari perbedaan produktivitas setiap individu yang mana satu individu/kelompok mempunyai produktivitas yang lebih tinggi daripada individu/kelompok lain. Ketimpangan atau kesenjangan dari pendapatan ini merupakan tolok ukur dari distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah pada periode tertentu. Kecenderungan dari kenaikan tren ketimpangan pendapatan tersebut terjadi baik di level nasional, perkotaan, pedesaan, juga di semua wilayah provinsi di Indonesia. Di dalam perkotaan, ketimpangannya cenderung lebih besar daripada di suatu pedesaan, demikian juga yang terjadi di kota-kota besar.

Di samping itu untuk memahami masalah-masalah pertumbuhan ekonomi yang dihadapi negara-negara berkembang, terutama negara berkembang yang masih rendah taraf pembangunan dan kemakmuran, perlu pula diperhatikan masalah-masalah yang dihadapi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Seterusnya perlu diperhatikan bentuk kebijakan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2013).

Pembangunan ekonomi suatu daerah salah satunya dapat dicapai dengan meningkatkan laju dari pertumbuhan ekonomi daerah. Pengukuran Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan

dengan menghitung pertumbuhan dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan menunjukkan proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan PDRB ini dapat digunakan sebagai tolok ukur apakah kebijakan yang selama ini dilaksanakan berhasil atau belum. Penghitungan pertumbuhan biasanya dapat dilakukan dalam waktu tahunan untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian dari suatu daerah.

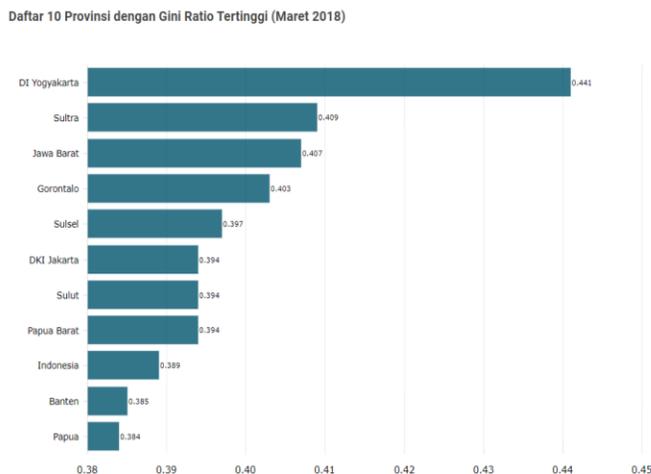
Faktor sumberdaya yang beranekaragam mengakibatkan pembangunan nasional sebaiknya tidak hanya dilaksanakan secara terpusat tetapi perlu berorientasi pada pembangunan regional. Keputusan yang diambil pemerintah pusat semakin memperbesar inefisiensi karena banyak proyek yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Sehingga Konsep Trilogi Pembangunan belum berhasil secara signifikan untuk mengurangi kesenjangan. Dampak dari kesenjangan tersebut membuat beberapa daerah merasa diperlakukan tidak adil. Kesenjangan pendapatan yang semakin besar telah menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya pengangguran, kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan, perumahan, kebutuhan pokok, rasa aman dan lain-lain (Mahrizal, *et al.*, 2014).

Ketimpangan, tidak selalu muncul di kota-kota besar. Di provinsi Yogyakarta, yang hanya terdiri dari satu dari ke lima wilayahnya berupa perkotaan, ketimpangan pendapatan justru paling besar di Indonesia. Dalam mengukur ketimpangan pendapatan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Indeks Gini Rasio alias indeks gini. Indeks ini menggunakan skala 0-1. Semakin besar nilai dari indeks gini, semakin besar pula ketimpangannya. Artinya, jurang ekonomi yang terjadi diantara kelompok di wilayah tersebut semakin lebar. BPS hanya menghitung jumlah dari pengeluaran konsumsi yang dilakukan masyarakat untuk mengukur rasio ini. Menurut pengukuran BPS, nilai ketimpangan pendapatan di Indonesia mencapai 0,393. Tapi di wilayah Yogyakarta indeks ketimpangan ini mencapai 0,432 melampaui dari kota-kota besar lainnya di Indonesia yaitu Jakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Ketimpangan pengeluaran penduduk di bulan Maret 2018 mengalami penurunan. Namun, di beberapa provinsi angka ketimpangan tersebut masih di atas angka ketimpangan nasional. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan provinsi dengan angka ketimpangan yang tertinggi dengan nilai Gini rasio sebesar 0,441. Di urutan kedua adalah Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan Gini ratio

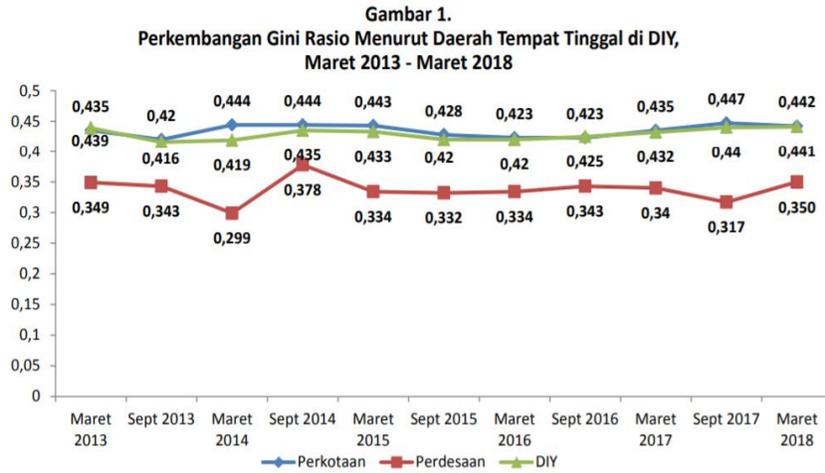
sebesar 0,409 dan yang ketiga adalah Jawa Barat 0,407. Dari 10 provinsi dengan indeks Gini ratio tertinggi, delapan di antaranya adalah berada di atas angka ketimpangan nasional.

Tabel 1
Daftar 10 provinsi dengan Gini Ratio Tertinggi (Maret 2018).



Sumber : www.katadata.co.id

Gini Ratio adalah ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah. Nilai Gini Ratio berada pada rentang antara 0 sampai dengan 1, dimana semakin besar nilai Gini Ratio menunjukkan semakin tinggi tingkat ketimpangan penduduk di suatu tempat. Perkembangan Gini Ratio di D.I. Yogyakarta selama rentang waktu lima tahun terakhir ditunjukkan oleh Gambar 1. Terlihat bahwa angka Gini Ratio pada Maret 2013 - Maret 2018 berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Gini Ratio di D.I. Yogyakarta mencapai angka terendah pada September 2013 yang besarnya 0,416. Angka Gini Ratio pada Maret 2018 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (www.bps.go.id).



Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki indeks nilai Gini Ratio atau ketimpangan pengeluaran tertinggi di Indonesia yakni sebesar 0,441 pada Maret 2018. Dibanding dengan Gini Ratio nasional yang hanya sebesar 0,389. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017 salah satu misinya adalah untuk menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif, dan kreatif, yang bertujuan salah satunya untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

METODE

Jenis dan sumber data penelitian merupakan faktor yang penting yang menjadi pertimbangan yang menentukan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dan literatur-literatur lain yang membahas mengenai materi penelitian tersebut.

Metode analisis yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi data panel :

$$Y = f (X1, X2,X3,X4) \dots\dots\dots (1)$$

atau secara eksplisit dapat dinyatakan dalam fungsi Non Linear berikut:

$$Y = \beta_0 + X_1 \beta_1 + X_2 \beta_2 + X_3 \beta_3 + X_4 \beta_4 + \mu \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

- Y = Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan
 β_0 = Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Parameter yang akan di estimasi
X1 = Pertumbuhan Ekonomi
X2 = Tingkat Pengangguran
X3 = Desentralisasi Fiskal
X4 = Upah Minimum Kabupaten/Kota
 μ = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 2 model estimasi yang terpilih yaitu common effect model menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, sementara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Tabel 2 Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,160756	0,046172	3,481717	0,0014
Pertumbuhan Ekonomi	0,000855	0,006431	0,132890	0,8950
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,015206	0,006861	2,216351	0,0333
Desentralisasi Fiskal	-0,000818	0,001478	-0,553712	0,5833
Upah Minimum Kab/Kota Provinsi D.I.Yogyakarta	1,37,E+07	3,70,E-08	3,701402	0,0007

Sumber: Output Eviews diolah

Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi bernilai positif dan tidak signifikan. Hasil ini berbeda dengan penelitian Sudarlan (2015) dalam penelitiannya menyatakan terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Tingkat pengangguran dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan, hasil ini mendukung penelitian Matondang (2018) dimana pada penelitian tersebut tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan.

Desentralisasi fiskal pada penelitian ini menunjukkan nilai negatif dan tidak signifikan. Hasil ini melawan Abdullah (2013) dimana pada hasil penelitiannya ditemukan beban penduduk usia produktif yang menanggung usia non produktif semakin bertambah akan menaikkan ketimpangan tersebut derajat desentralisasi fiskal justru bernilai negatif dan signifikan. Upah minimum kabupaten/kota dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan, hasil ini mendukung penelitian Abdullah (2013) dimana pada penelitian tersebut upah berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Apabila nilai F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependennya. Apabila nilai F hitung $>$ F tabel, maka H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya. Uji hipotesis secara simultan menggunakan uji F, tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji F

Cross-section random			
R-squared	0,523005	Mean dependent var	0,36683
Adjusted R-squared	0,468491	S.D. Dependent var	0,053301
S.E. Of regression	0,038859	Sum squared resid	0,052851
F-statistic	9,594003	Durbin-Waston Stat	2,064621
Prob(F-statistic)	0,000024		

Sumber: Output Eviews diolah

Berdasarkan hasil output Eviews di atas, nilai F hitung yaitu sebesar 9,594003 sementara F tabel dengan tingkat $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 2,64. Dengan demikian F hitung $>$ F tabel ($9,594003 > 2,64$), kemudian juga terlihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,000024 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, desentralisasi fiskal, dan upah minimum kabupaten/kota secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat distribusi ketimpangan pendapatan, sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Koefisien determinasi (R²) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai R² yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Koefisien determinasi (R²)

Cross-section random			
R-squared	0,523005	Mean dependent var	0,36683
Adjusted R-squared	0,468491	S.D. Dependent var	0,053301
S.E. Of regression	0,038859	Sum squared resid	0,052851
F-statistic	9,594003	Durbin-Waston Stat	2,064621
Prob(F-statistic)	0,000024		

Sumber: Output Eviews diolah

Berdasarkan Tabel 4 besar angka koefisien determinasi (R²) adalah 0.523005. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 52,30%. Atau dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 52,30%. terhadap variabel dependennya. Sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model regresi tersebut.

Analisis regresi yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui hubungan yang dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, desentralisasi fiskal, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Berikut ini merupakan tabel yang merangkum hubungan yang terjadi pada variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5 Hubungan Variabel Independen terhadap Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Variabel	Hubungan yang ditemukan	Signifikansi
Pertumbuhan Ekonomi	Tidak ada pengaruh	Tidak signifikan
Tingkat Pengangguran Terbuka	Berpengaruh	Signifikan
Desentralisasi Fiskal	Tidak ada pengaruh	Tidak signifikan
Upah Minimum Kab/Kota	Berpengaruh	Signifikan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan sehingga peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Pangkiro, *et.al* (2017) pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jawaban sebagai turunnya angka ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi, akibat sumbangan pada sektor yang menyerap tenaga kerja sedikit. Sedangkan sektor dengan tenaga kerja yang banyak masih belum menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi.

Tingkat pengangguran menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Arsyad (2010) pertumbuhan penduduk biasanya memicu timbulnya masalah. Permasalahan akan muncul jika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan. Tingkat pengangguran yang ada pada suatu wilayah dapat mempengaruhi ketimpangan wilayah. Semakin besar tingkat pengangguran disuatu daerah berarti menurunkan tingkat produktivitas dan akan memicu menurunnya pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, sementara wilayah lain terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan (Erwan dalam Yusica, *et.al*, 2018). Hasil kajian IMF menemukan hubungan positif antara pengangguran terhadap ketimpangan. Dimana pada kelompok negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang, menekankan pentingnya kualitas penciptaan lapangan kerja dan suatu kebijakan untuk mendukung pekerjaan dapat mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Hasil yang sama ditunjukkan oleh variabel desentralisasi fiskal dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dimana peningkatan atau penurunan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Aritenang (2010), yang menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal tidak memiliki peranan yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan. Menurut Aritenang (2010) Kesenjangan tetap mengalami peningkatan bahkan setelah kebijakan desentralisasi fiskal dilaksanakan. Sedangkan variabel upah minimum dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga peningkatan atau penurunan upah minimum berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Institusional ekonom berpendapat bahwa upah minimum

mengurangi ketimpangan. Menurut Sungkar, *et.al* (2015) upah minimum tidak hanya menjadi batas minimum upah secara umum, tetapi juga mempengaruhi kenaikan pendapatan dan memiliki dampak penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Stewart (2000) mengungkapkan upah minimum berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di beberapa Negara. Perubahan dalam undang-undang upah minimum merupakan faktor penting dan relevan memberikan kontribusi untuk memperlambat ketimpangan upah antara bagian atas dan bawah dari distribusi upah dan pendapatan di Indonesia (Khor dan Chun, 2010).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, desentralisasi fiskal, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2011 - 2018, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.
2. Tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.
3. Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.
4. Upah minimum berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.
5. Secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, desentralisasi fiskal, dan upah minimum berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.

Selanjutnya dari kesimpulan yang telah diberikan, maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah memberikan wadah bagi calon tenaga kerja berupa pelatihan dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja agar siap bersaing di dunia kerja.
2. Dalam mengurangi ketimpangan pendapatan melalui kebijakan upah minimum tersebut, diharapkan tidak hanya menggunakan standar standar baku yang baru sedekat mungkin dengan kebutuhan dasar manusia yang harus menjadi insentif yang mendorong tenaga kerja untuk beralih ke kelompok karyawan (sektor formal).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Rusli. 2013. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Tengah. *Jurnal Jejak* 6(1):42-53.
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat
- Abdulah, Rusli. 2013. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Tengah. *Jurnal Jejak* 6(1):42-53.
- Amir, Hidayat. 2012. Ketimpangan Antar Wilayah Melebar Atau Merapat. *Jurnal Warta Fiskal* 5(2): 16-19.
- Amri, Khairul. 2017. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomidan Manajemen Teknologi* 1(1): 1-11.
- Aritenang, A. F. 2010. A Study on Indonesia Regions Disparity: Post Decentralization. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.1737977.
- Arsyad, Lincoln, 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Damanik, A.Mugabe, Zulgani dan Rosmeli. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 7(1): 15-25.
- Hariadi, P., Arintoko dan Ick Rangga Buwono. 2008. Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 13(2):61-70.
- Kadarwati, N., Setiasih, E., dan Rasmusi, IMP. 2015. Ketimpangan Pendapatan Dan Keuangan Daerah Di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Eko Regional* 10(2): 139-144.
- Khor, N. and Chun, N. 2010. Minimum Wages and Changing Wage Inequality in Indonesia. *ADB Economics Working Paper Series No.196*
- Kurniasih, E. Panca. 2013. Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet. *Jurnal Eksos* 9(1): 36-48.
- Levitan, A. dan Richard S. Belous. 1979. *More Than Subsistence: Minimum Wages for the Working Poor*. Baltimore: The Hopkins University Press.
- Mahrizal, Hamzah A, dan Sofyan Syahnur. 2014. Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi* 2(2): 91-100.

- Matondang, Z. 2018. Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, 2(2), 255–270.
- Novriansyah, M.Arif. 2018. Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Gorontalo Development Review* 1(1): 59-73.
- Nurlina, Chaira, M.I. Chaira. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika* 1(2): 174-182.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- Pitartono, R. dan Hayati, B. 2012. Analisis Tingkat Pengangguran Di Jawa Tengah Tahun 1997-2010. *Jurnal Of Economics Diponegoro*. 1(1): 1-10.
- Pangkiro, H. A. K., Ch.Rotinsulu, D., & Wauran, P. 2017. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap, 1(2), 196–210.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY 2012-2017.
- Rosa, Y. Del dan Ingra Sovita. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa. *Jurnal Menara Ekonomi* 2(4): 41-52.
- Sjafrizal. 2009. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. Prisma. Nomor 3 tahun XXVI. 34-52. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Sudarlan. 2015. Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Eksis* 11(1): 3096-3103.
- Sukirno, Sadono. 2013. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali pers.
- Sungkar, S. N., Nazzamudin, & Nasir, M. 2015. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia, 40–53.
- Stewart, Francis. 2000. Income Distribution And Development. QEH Working Paper Series - QEHWPS37.
- Tambunan, Tulus, TH. 2009. Perekonomian Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P, 2013. Edisi Kesebelas. Pembangunan Ekonomi. Jakarta :Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

www.bps.go.id

www.katadata.co.id

Yusica, L. V., Malik, N., & Arifin, Z. 2018. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur. *Ilmu Ekonomi*, 2, 230–240.